YAMAHA
Revs your Heart
SEMAKIN DI DEPAN

SULTENG RAYA

Perekat Rakyat Sulteng

SENIN, 9 NOVEMBER 2026 | 8 HALAMAN

LANGGANAN: RP.100.000,- | ECERAN: RP.5.000,-

WAR ON DRUGS
For Humanity

Anwar Hafid Yakin Sekolah Rakyat Lahirkan Tadulako Masa Depan

SULTENG RAYA - Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 20 Tadulako Nambaso diharapkan menjadi kawah candradimuka lahirnya pemimpin-pemimpin besar Sulawesi Tengah di masa depan.

Hal itu disampaikan saat syukuran peletakan batu pertama pembangunan gedung SR Terintegrasi 20 Tadulako Nambaso, Minggu (8/11/2026).

Gubernur Anwar Hafid optimis bahwa sekolah ini mampu mencetak generasi unggul daerah yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia dan berpendirian kuat.

Ditambah lagi, SR Tadulako Nambaso merupakan perwujudan cita-cita Sulteng Nambaso, yakni memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi keluarganya.

"Jangan pernah berpikir karena berasal dari keluarga tidak mampu, kalian tidak bisa menjadi orang hebat," tegasnya menyemangati para siswa yang hadir di acara.

Gubernur juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghadirkan SR sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Baca SEKOLAH Hal. 7



GUBERNUR Anwar Hafid melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung SR Terintegrasi 20 Tadulako Nambaso, Minggu (8/11/2026). **FOTO: BIRO ADPIM**

Polisi Gagalkan Dugaan Peredaran Sabu di Pelawa



PRIA berinisial RSL terduga pelaku pengedar sabu ditangkap di Desa Pelawa Kecamatan Parigi Tengah, Sabtu (7/11/2026) sore. **FOTO: HUMAS POLRES PARIGI MOUTONG**

SULTENG RAYA – Upaya memutus mata rantai peredaran narkotika di Kabupaten Parigi Moutong kembali membuahkan hasil.

Kali ini, jajaran Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Parigi Moutong mengamankan seorang pria berinisial RSL di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Sabtu (7/11/2026) sore.

Baca POLISI Hal. 7

Dua Penindakan dalam Semalam, Polsek Torue Sita 20 Paket Sabu di Desa Tolai



DUA terduga pelaku pengedar sabu berhasil diamankan jajaran Polsek Torue, Jumat (6/11/2026) malam. **FOTO: POLSEK TORUE**

SULTENG RAYA – Upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus dilakukan jajaran Polres Parigi Moutong.

Kali ini, personel Polsek Torue mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dalam dua penindakan berbeda di Desa Tolai, Kecamatan Torue.

Baca PENINDAKAN Hal. 7

Pemkab Sigi Raih Anugerah Cita Negeri 2026 dari KompasTV

SULTENG RAYA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi meraih penghargaan Anugerah Cita Negeri 2026 yang diselenggarakan KompasTV, Senin (2/11/2026).

Penghargaan tingkat nasional tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kinerja dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

Penghargaan ini diraih di bawah kepemimpinan Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, melalui berbagai upaya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama

Baca PEMKAB Hal. 7



SEKRETARIS Daerah Kabupaten Sigi, Nuim Hayat menerima penghargaan Anugerah Cita Negeri 2026 dari KompasTV, yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, di Studio 1 KompasTV Senin (2/11/2026). **FOTO : DISKOMINFO SIGI**

Bupati Morowali Pastikan Pengaspalan Jalan Pulau Paku Mulai 2027

SULTENG RAYA - Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf memastikan pengaspalan ruas jalan lingkar wilayah utara Pulau Paku di Kecamatan Bungku Selatan mulai dilaksanakan pada 2027.

"Desa Paku ini Insya-Allah 2027 semua jalan, jalan lingkar yang menyambungkan aspal lama nanti akan kami aspal. Kita telah menyediakan anggaran kurang lebih Rp30 miliar di 2027. Jadi aspal semua, tidak ada lagi berdebu," kata Iksan di Morowali, Sabtu.

Ia mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk mendukung pekerjaan pengaspalan seluruh ruas jalan lingkar yang menghubungkan akses jalan yang sebelumnya telah diaspal.

Menurut dia, pengaspalan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan akses jalan sekaligus mengatasi persoalan debu yang selama ini menggganggu aktivitas warga.

Iksan menjelaskan pelaksanaan pekerjaan akan

Baca BUPATI Hal. 7



BUPATI Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf. **FOTO: ANTARA/ DOKUMENTASI PEMDA MOROWALI**

Realisasi Investasi Sulteng Capai Rp116 Triliun



KEPALA DPMPTSP Sulteng Mohammad Rifani Pakamundi. **FOTO: ANTARA/MUHAMMAD IZFALDI**

SULTENG RAYA - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat realisasi investasi di daerah itu mencapai Rp116 triliun hingga September 2026 atau 124 persen dari target tahunan sebesar Rp93,89 triliun.

"Realisasi investasi Januari-September 2026 sudah mencapai Rp116 triliun. Angka ini sekitar 124 persen dari target tahunan yang diberikan pemerintah pusat kepada Sulawesi Tengah, yakni Rp93,89 triliun," kata Kepala DPMPTSP Sulteng Mohammad Rifani Pakamundi di Palu, Jumat.

Ia mengatakan capaian tersebut menempatkan Sulteng pada peringkat ketiga nasional dalam realisasi investasi, setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Berdasarkan data DPMPTSP Sulteng, realisasi investasi pada periode Januari-September 2026 tumbuh 18,84 persen dibandingkan periode yang

Baca REALISASI Hal. 7

Aktorismo Sebut Penunjukan Pejabat Eselon II ke Plt Eselon III Bukan Penurunan Jabatan



AKTORISMO KAY

SULTENG RAYA – Kekosongan jabatan dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kesinambungan roda pemerintahan. Untuk memastikan pelayanan dan pelaksanaan tugas kedinasan tidak terganggu, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menunjuk sejumlah Pelaksana Tugas (Plt) pada jabatan eselon III.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Parigi Moutong, Aktorismo Kay, menjelaskan bahwa penunjukan Plt merupakan langkah administratif untuk mengisi sementara jabatan yang ditinggalkan pejabat definitif.

Menurutnya, penugasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan program dan tugas pemerintahan pada masing-masing OPD tetap berjalan sebagaimana mestinya, terutama pada jabatan yang memiliki peran strategis.

"Pelaksana tugas ini sebenarnya untuk menjalankan tugas sementara yang ditinggalkan oleh pejabat definitif. Agar pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di setiap OPD bisa berjalan sebagaimana mestinya," kata Aktorismo.

Ia menegaskan, penunjukan Plt dari OPD lain tidak menjadi masalah selama memenuhi ketentuan administrasi dan regulasi kepegawaian yang berlaku. Pertimbangan utama adalah memastikan tugas pemerintahan tetap terlaksana di tengah kekosongan jabatan.

"Dari sisi administrasi sebenarnya tidak ada persoalan. Selagi sesuai regulasi dan ketentuan dimungkinkan, maka tidak ada masalah," jelasnya.

Terkait adanya pejabat eselon II yang mendapat penugasan sebagai Plt pada jabatan eselon III, Aktorismo menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penurunan jabatan.

Ia menjelaskan, penugasan Plt merupakan tugas tambahan yang dipercayakan pimpinan, bukan pengangkatan dalam jabatan definitif. Karena itu, status jabatan pejabat yang bersangkutan tidak berubah hanya karena menerima penugasan tersebut.

"Plt ini sifatnya hanya tugas tambahan. Kami tidak memaknai bahwa itu turun jabatan," ujarnya.

Mengenai batas waktu penugasan, Aktorismo menyebut masa jabatan Plt pada prinsipnya berlangsung selama tiga bulan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan. Namun, penugasan tersebut dapat berakhir lebih awal apabila jabatan yang kosong telah diisi pejabat definitif.

"Namun, apabila sebelum tiga bulan sudah diisi oleh pejabat definitif, maka dengan sendirinya berakhir pelaksana tugas," ungkapnya.

Sementara itu, terkait pengisian jabatan definitif eselon III, BKPSDM saat ini tengah melakukan sejumlah tahapan persiapan. Proses tersebut mencakup evaluasi kinerja dan kelengkapan administrasi sebelum dibahas di tingkat pimpinan pemerintah daerah.

Selanjutnya, usulan pengisian jabatan akan diajukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperoleh rekomendasi sesuai ketentuan.

Aktorismo berharap seluruh tahapan dapat dipercepat sehingga jabatan yang saat ini masih diisi Plt segera ditempati pejabat definitif.

"Insya Allah dalam waktu dekat. Saat ini sedang dilakukan evaluasi kinerja, administrasi dan lain-lain untuk dibahas di tingkat pimpinan. Kemudian akan diajukan ke BKN untuk mendapatkan rekomendasi," katanya.

Meski demikian, ia belum dapat memastikan waktu pelaksanaan pengisian jabatan definitif tersebut, apakah akan rampung sebelum akhir 2026 atau baru terealisasi pada 2027.

Menurutnya, pemerintah daerah tetap harus menjalankan seluruh prosedur dan tahapan sesuai regulasi, tanpa mengabaikan upaya percepatan pengisian jabatan. AJI

KUNJUNGI BASARNAS PALU

Siswa SPN Polda Sulteng Belajar Organisasi dan Peralatan SAR

SULTENG RAYA - Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu menerima kunjungan 51 siswa Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 dari Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Sulawesi Tengah, Minggu (8/11/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Peninjauan Objek Penting (POJ) dalam rangka pengenalan lingkungan dan pembelajaran bagi para siswa Diktuk Bintara Polri.

Dalam kegiatan ini, para siswa mendapatkan pengenalan mengenai organisasi Basarnas, mulai dari tugas dan fungsi, struktur organisasi, hingga peran Basarnas dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Selain pengenalan organisasi, para siswa juga diperkenalkan dengan berbagai peralatan SAR yang digunakan dalam pelaksanaan operasi di lapangan. Pengenalan tersebut meliputi peralatan ekstrikasi yang digunakan untuk membantu proses evakuasi korban dalam kondisi tertentu, peralatan Water Rescue untuk mendukung operasi penyelamatan di perairan, serta peralatan HART (High Angle Rescue Technique) untuk teknik penyelamatan di ketinggian.

Melalui pengenalan tersebut, para siswa dapat melihat secara langsung berbagai peralatan yang dimiliki Basarnas sekaligus memahami penggunaannya dalam mendukung pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Muh. Rizal, S.H., CAI., C.Mtr., menyampaikan, pihaknya menyambut baik kunjungan para siswa SPN Polda Sulawesi Tengah. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tugas dan tanggung jawab Basarnas kepada calon anggota Polri.

"Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan edukasi dan pengenalan kepada seluruh siswa mengenai organisasi, tugas dan fungsi Basarnas, termasuk berbagai peralatan SAR yang digunakan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya untuk menjalin kerja sama dan memperkuat sinergi antara Basarnas dan Polri dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan," ungkapnya.

Ia berharap, melalui kegiatan ini, para siswa dapat memperoleh pengetahuan baru mengenai pelaksanaan operasi SAR serta memahami pentingnya koordinasi dan kerja sama antarlembaga ketika menghadapi situasi darurat yang membutuhkan penanganan bersama.

Kunjungan ini menjadi salah satu bentuk penguatan hubungan kelembagaan antara Basarnas dan Polri. Sinergi kedua instansi diharapkan terus terjalin dengan baik dalam memberikan pelayanan serta membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan dalam berbagai kondisi kedaruratan. AMR



PULUHAN siswa SPN Polda Sulteng, saat berkunjung ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Minggu (8/11/2026). Para siswa dikenalkan organisasi dan peralatan SAR. FOTO: HUMAS SAR PALU

Gasak Alfamidi, Dua Pria Asal Bualemo Diringkus Polisi



DUA pelaku yang menggasak Alfamidi di Desa Bayou, saat diamankan Satreskrim Polresta Palu, Jumat (6/11/2026). FOTO: HUMAS POLRESTA BANGGAI

SULTENG RAYA – Polresta Banggai meringkus dua pria yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian di salah satu gerai Alfamidi di Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai.

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial GA (19) dan AL (22). Keduanya merupakan warga Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai yang diamankan pada Jumat (6/11/2026) malam di kawasan Kompleks Kelapa Dua, tanpa perlawanan.

Kasat Reskrim Polresta Banggai AKP Nur Arifin menjelaskan, ketika akan membuka gerai tersebut sekira pukul 07. 30 Wita, salah seorang karyawan Alfamidi mendapati uang dalam laci kasir sebesar Rp300 ribu telah hilang.

Setelah dilakukan pemeriksaan rekaman CCTV, diketahui bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, terekam seorang pria mengenakan jaket hitam dengan wajah tertutup kain masuk ke dalam toko dan mengambil sejumlah barang. Sementara seorang lainnya berada di luar untuk memantau situasi.

Berbekal petunjuk tersebut, petugas kemudian memperoleh informasi keberadaan para terduga pelaku. Tim bergerak cepat dan berhasil mengamankan mereka di kawasan kelapa dua Simpong.

"Keduanya mengakui keterlibatannya, GA masuk ke dalam toko dan mengambil uang Rp300 ribu serta sejumlah barang dagangan berupa berbagai merek rokok dan deodoran. Sementara AL menunggu di luar toko memantau situasi," urai Arifin.

Dari hasil penyelidikan, pelaku mengungkapkan sebagian besar uang yang diperoleh dari penjualan barang hasil curian diduga digunakan untuk bermain judi online.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa puluhan bungkus rokok berbagai merek, dua buah deodoran, uang tunai sebesar Rp385 ribu, satu unit sepeda motor. AMR

Tekan Angka Kecelakaan, Polres Touna Larang Pelajar Berkendara

SULTENG RAYA – Jajaran Polres Tojo Una-Una (Touna) terus menggembleng disiplin berlalu lintas bagi generasi muda. Lewat Subsatgas Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Operasi Tinombala 2026, polisi menyambangi SMP Negeri 3 Ampana Kota di Desa Sansarino, Sabtu (7/11/2026) pagi, untuk mensosialisasikan larangan berkendara bagi anak di bawah umur.

Tim Subsatgas Dikmas yang digawangi Aiptu Aji Abdullah, Aipda Ade Saiful, dan Bripka Muhammad Faisal memberikan pemahaman persuasif secara langsung di hadapan para pelajar di sekolah tersebut.

Fokus utama sosialisasi ini menyasar bahaya nyata serta aturan hukum terkait larangan mengendarai kendaraan bermotor bagi remaja yang belum genap berusia 17 tahun atau belum mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kasat Lantas Polres Touna, AKP H. Siswanto, menegaskan edukasi langsung ke sekolah menjadi langkah krusial untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang kerap melibatkan usia remaja. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Touna. "Kami ingin adik-adik pelajar paham betul bahaya di jalan raya. Mematuhi aturan lalu lintas itu demi keselamatan diri sendiri dan orang lain,"ujar Siswanto.

Ia mengingatkan, anak di bawah umur pada dasarnya belum memiliki kesiapan fisik maupun mental yang matang untuk mengendalikan kendaraan di jalan umum.

"Secara emosional dan keterampilan, mereka belum siap berkendara. Karena itu peran sekolah dan orang tua juga sangat penting untuk tidak mengizinkan anak-anaknya membawa motor ke sekolah," ujar kasat. AMR



PERSONEL Satlantas Polres Touna, saat memberikan edukasi larangan berkendara bagi para pelajar di SMPN 3 Ampana Kota, Sabtu (7/11/2026) pagi. FOTO: SATLANTAS TOUNA

Kapolda Sulteng Bangun Kedekatan dengan Tokoh Agama

SULTENG RAYA - Upaya menjaga keamanan dan keharmonisan masyarakat terus diperkuat Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui pendekatan dengan tokoh agama. Kali ini, Kapolda Sulteng Irjen Pol Rizal Irawan bersilaturahmi dengan Ketua Utama Alkhairaat, Habib Alwi bin Saggaf Aljufri, di kediamannya, Kamis (5/11/2026).



KAPOLDA Sulteng Irjen Pol Rizal Irawan didampingi Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Semmy Ronny Thabaa, saat bersilaturahmi dengan Ketua Utama Alkhairaat, Habib Alwi bin Saggaf Aljufri, di kediamannya, Kamis (5/11/2026). **FOTO: BIDHUMAS POLDA SULTENG**

Kunjungan tersebut turut didampingi Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Semmy Ronny Thabaa, Karo SDM Kombes Pol Anton Sudjarwo, serta sejumlah pejabat utama Polda Sulteng.

Silaturahmi ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan sekaligus membangun sinergi antara kepolisian dan keluarga besar Alkhairaat dalam menjaga kamtibmas di Sulawesi Tengah.

Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Achmad Muhaimin mengatakan, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk dukungan Alkhairaat terhadap tugas kepolisian dan pengenalan konsep Polisi Bersama Masyarakat serta program-program Kapolri.

"Pembahasan juga menyangkut penggunaan media sosial secara bijak, pencegahan berita hoaks, penyalahgunaan narkoba, hingga upaya mencegah terjadinya konflik sosial," ujar Muhaimin. Pertemuan tersebut juga membahas rencana kerja sama Polda Sulteng dan Alkhairaat dalam pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Pemuda Alkhairaat sebagai upaya membangun generasi muda yang positif dan berkontribusi bagi masyarakat.

Kabid Humas berharap komunikasi dan kerja sama yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan. Dukungan tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat dinilai penting untuk menjaga persatuan serta stabilitas kamtibmas di Sulawesi Tengah. "Semoga silaturahmi ini semakin memperkuat kebersamaan dan sinergi antara Polda Sulteng dengan Alkhairaat, sehingga bersama-sama kita dapat menjaga kerukunan, mencegah potensi gangguan kamtibmas, dan mewujudkan Sulawesi Tengah yang aman, damai serta kondusif," harapnya.*/YAT

Kapolda Sulteng Bersihkan Pantai Penggaraman Talise

SULTENG RAYA - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Kapolda Sulteng), Irjen Pol. Rizal Irawan memimpin aksi Green Policing melalui kegiatan gotong royong membersihkan kawasan Pantai Penggaraman Talise, Kampung Nelayan, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Jumat (6/11/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai pukul 07.30 WITA tersebut melibatkan pejabat utama dan personel Polda Sulteng, komunitas ojek online (ojol), serta masyarakat setempat. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda bersama seluruh peserta turun langsung memungut sampah di sepanjang kawasan pantai. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah.

Kapolda Sulteng juga mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan hidup bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan serta menjadikan pelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.

Kabidhumas Polda Sulteng, Kombes Pol. Achmad Muhaimin mengatakan, kegiatan tersebut mencerminkan komitmen Polri untuk hadir dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga kawasan pesisir agar tetap bersih, sehat, dan lestari," ujar Achmad Muhaimin.

Menurutnya, aksi gotong royong tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan.

Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga kepedulian terhadap kebersihan menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari masyarakat.

Melalui aksi Green Policing ini, Polda Sulteng berharap kesadaran kolektif dalam menjaga ekosistem pesisir semakin meningkat, sehingga kawasan Lingkungan Pantai tetap bersih dan terjaga kelestariannya untuk generasi mendatang.*/YAT



KAPOLDA Sulteng, Irjen Pol. Rizal Irawan saat memungut sampah di kawasan Pantai Penggaraman Talise, Kampung Nelayan, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Jumat (6/11/2026) pagi. **FOTO: BIDHUMAS POLDA SULTENG**

PN Palu Gelar Rapat Berjenjang Hakim

SULTENG RAYA - Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Palu Kelas IA melaksanakan Rapat Berjenjang Hakim Bulan November 2026 yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Palu, Imam Santoso, bersama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, Rudito Surotomo, Jumat (6/11/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Hakim Karir maupun Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri Palu sebagai wadah koordinasi, evaluasi, serta pembahasan berbagai hal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.

Ketua Pengadilan Negeri Palu, Imam Santoso berharap, melalui rapat berjenjang ini, diharapkan terwujud kesamaan persepsi, peningkatan koordinasi, serta penguatan komitmen seluruh hakim dalam mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel.*/YAT



SEJUMLAH hakim Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Palu Kelas IA saat mengikuti Rapat Berjenjang Hakim Bulan November 2026, Jumat (6/11/2026). **FOTO: DOK PN PALU**

Kebakaran 2 Hektare Lahan di Pegunungan Tokasa Berhasil Dipadamkan

SULTENG RAYA - Respons cepat ditunjukkan jajaran Polsek Torue dalam menangani kebakaran lahan di kawasan Pegunungan Tokasa, Desa Tanalanto, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (5/11/2026).

Mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar pukul 20.00 WITA, Kapolsek Torue Iptu Ramlin langsung memimpin personel menuju lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan sekaligus membantu upaya pemadaman.

Setibanya di lokasi, personel Polsek Torue bersama anggota TNI dari Koramil 17 Sausu dan masyarakat setempat bahu-membahu memadamkan kobaran api menggunakan peralatan seadanya.

Kondisi geografis pegunungan dengan akses yang sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan.

Berdasarkan hasil pendataan awal, kebakaran menghanguskan lahan kosong bekas pembukaan perkebunan dengan luas sekitar 2 hektare. Material berupa rumput, ranting, dan kayu kering sisa penebangan diduga mempercepat perambatan api.

Berkat kerja sama dan upaya bersama TNI-Polri serta masyarakat, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 00.15 WITA, Jumat (6/11/2026). Situasi di sekitar lokasi kemudian terpantau aman dan terkendali.

Kapolsek Torue Iptu Ramlin menegaskan bahwa kehadiran personel kepolisian di lokasi merupakan bentuk respons cepat Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mencegah meluasnya dampak kebakaran.

"Kami bergerak cepat setelah menerima informasi dari masyarakat. Bersama personel TNI dan warga, kami berupaya maksimal melakukan pemadaman agar api tidak semakin meluas. Kami juga mengimbau masyarakat, khususnya pemilik lahan perkebunan, agar tidak melakukan pembakaran sembarangan terhadap sisa-sisa hasil penebangan karena dapat memicu kebakaran dan membahayakan lingkungan sekitar," tegas Iptu Ramlin.

Lebih lanjut, Kapolsek menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan pengumpulan bahan keterangan dan pendalaman untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Hingga saat ini, belum dapat dipastikan apakah peristiwa tersebut dipicu faktor alam, kelalaian, maupun unsur kesengajaan.

Polsek Torue juga terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pemerintah desa serta masyarakat guna mengantisipasi potensi kebakaran susulan.

Melalui kejadian ini, Polri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan serta mengutamakan langkah pencegahan demi menjaga keselamatan warga dan kelestarian lingkungan.*/YAT



KEBAKARAN lahan di kawasan Pegunungan Tokasa, Desa Tanalanto, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (5/11/2026). **FOTO: DOK POLSEK TORUE**



Asia Tenggara Rencanakan 37 GW Nuklir Hingga 2050



PENELITI BRIN melakukan pengecekan kolam reaktor nuklir di fasilitas Reaktor Serba Guna G.A Siwabessy, di kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (15/7/2024). **FOTO: ANT**

SULTENG RAYA - Asia Tenggara dinilai sebagai salah satu kawasan paling siap mengembangkan energi nuklir. Lonjakan kebutuhan listrik, ketergantungan pada bahan bakar impor, dan tekanan dekarbonisasi membuat nuklir dipandang sebagai bagian penting bauran energi kawasan ke depan.

Direktur Jenderal World Nuclear Association (WNA) Sama Bilbao y León mengatakan, kapasitas pembangkit nuklir yang direncanakan di Asia Tenggara hingga 2050 mencapai sekitar 37 gigawatt (GW). Angka itu kira-kira seperempat dari total ambisi kapasitas nuklir seluruh negara pendatang baru di dunia.

Ia optimistis akan kesiapan Asia Tenggara mengadopsi energi nuklir. "Terus terang, saya kira hanya sedikit kawasan di dunia yang lebih siap untuk berhasil memanfaatkan energi nuklir," kata Sama dalam wawancara dengan Singapore International Energy Week (SIEW) 2026, tengah pekan lalu, merujuk laporan World Nuclear Outlook yang baru dirilis WNA.

Saat ini nuklir praktis belum hadir dalam bauran energi Asia Tenggara. Padahal, permintaan listrik terus melonjak seiring pertumbuhan ekonomi, ekspansi pusat data, dan kebutuhan pendinginan. Ketergantungan pada bahan bakar impor juga membuat kawasan ini rentan terhadap gangguan pasokan dan guncangan harga.

Vietnam, Indonesia, Filipina, dan Thailand sudah menetapkan target nuklir, sementara sejumlah negara lain masih mengkaji perannya. Menurut Sama, modal utama kawasan ini adalah kapasitas industri dan rekam jejak menuntaskan proyek infrastruktur besar tepat waktu dan sesuai anggaran. "Kondisi untuk pertumbuhan energi nuklir yang sukses sudah tersedia di sana," ujar dia.

Meski begitu, Sama menilai pekerjaan rumah masih banyak. Negara pendatang baru harus menyusun kebijakan, membangun infrastruktur regulasi, serta menyiapkan tenaga kerja dan kemampuan industri. Kabar baiknya, sebagian besar langkah itu bisa dikerjakan paralel sembari pemerintah merampungkan aspek hukum dan menilai pilihan teknologi.

Sama mendorong negara ASEAN membangun regulasi, industri, dan tenaga kerja nuklir secara bersama-sama. Ia juga menyarankan nuklir dirancang sebagai program nasional, bahkan regional, bukan proyek per proyek, agar efisiensi dan skala ekonomi tercapai lebih cepat.

Ia menegaskan, energi bukan sektor pelengkap, melainkan mesin penggerak perekonomian. Karena itu, nilai nuklir perlu dihitung dari manfaat sosialnya, yakni akses energi yang melimpah, terjangkau, tersedia 24 jam, dan bebas karbon.

Dalam sistem energi yang makin terhubung, nuklir tak hanya memasok listrik, tetapi juga menjaga stabilitas jaringan, inersia, serta frekuensi dan tegangan. Hal itu dinilai dapat menekan harga sekaligus membuat sistem lebih tangguh. Pilihan teknologinya pun beragam, dari reaktor besar hingga reaktor modular kecil (SMR).

Nuklir juga menghasilkan panas dan uap untuk industri. "Ketika negara-negara ini berupaya meninggalkan bahan bakar fosil dan batu bara, energi nuklir dapat berperan sangat penting untuk memberi tenaga baru bagi fasilitas-fasilitas tersebut," kata Sama.

ASEAN Serius Menimbang Nuklir

Sikap pragmatis negara-negara Asia Tenggara terhadap nuklir juga mengemuka dalam World Nuclear Supply Chain Conference yang digelar WNA di Manila, Filipina, pada 20-21 Oktober. Kawasan berpenduduk hampir 700 juta jiwa ini menampung sekitar 9 persen populasi dunia dan menyumbang sekitar 4 persen produk domestik bruto (PDB) global. Dalam satu dekade ke depan, Asia Tenggara diperkirakan menyumbang sekitar 20 persen pertumbuhan permintaan energi dunia.

Analis Energi International Energy Agency (IEA) Regional Cooperation Centre Yinglong Teng mengatakan, permintaan listrik Asia Tenggara tumbuh rata-rata sekitar 6 persen per tahun sejak 2015, hampir dua kali lipat rata-rata global. Tren itu diperkirakan berlanjut hingga 2035. Gas masih menjadi bagian rencana kelistrikan kawasan, tetapi krisis pasokan gas besar kedua dalam lima tahun terakhir bisa mendorong diversifikasi ke sumber energi domestik.

Menurut Teng, jika seluruh target nasional tercapai, nuklir dapat menambah sekitar 30 GW kapasitas baru pada 2050, cukup untuk memenuhi sekitar 8 persen pertumbuhan permintaan listrik pada periode itu. "Yang penting, nuklir juga dapat menggantikan porsi batu bara dan gas yang cukup besar di sektor ketenagalistrikan," ujarnya. Ia mengingatkan, nuklir adalah komitmen lintas generasi yang menuntut stabilitas kebijakan dan regulasi jangka panjang.

Direktur Eksekutif ASEAN Centre for Energy (ACE) Razib Dawood menilai perubahan geopolitik menambah urgensi. "Krisis terbaru di Timur Tengah telah menyadarkan kami. Dulu kami bicara transisi energi yang lebih bersih, kini kami bicara ketahanan energi," katanya.

Menurut Dawood, minat negara Asia Tenggara terhadap nuklir selama ini timbul-tenggelam, tetapi kini dipertimbangkan secara serius. Dalam skenario target terkoordinasi ASEAN, permintaan energi kawasan diproyeksikan naik empat kali lipat hingga 2060, sehingga dibutuhkan kapasitas nuklir 32,7 GW pada tahun itu.

Ia menyebut Indonesia baru-baru ini mengumumkan rencana pembangkit terapung berkapasitas 200 megawatt (MW) untuk salah satu pulaunya, sedangkan Vietnam merencanakan 2,4 GW. Filipina, Thailand, dan Malaysia tengah menyusun target atau menimbang opsi nuklir, sementara Singapura memulai studi eksploratif.

ASEAN akan menangani isu rantai pasok, keterampilan, pembiayaan, regulasi, keselamatan, safeguards, hingga penerimaan publik, termasuk kepatuhan pada tahapan infrastruktur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Kerja sama regional diposisikan sebagai jalan agar tiap negara dapat mengambil keputusan lebih cepat dan lebih matang.

Malaysia termasuk yang sudah bergerak. Pemerintah Malaysia meluncurkan kajian peran nuklir dalam bauran energi pada Agustus 2025, dengan MyPOWER Corporation sebagai koordinator. Lembaga di bawah Kementerian Transisi Energi dan Transformasi Air itu menjalankan kajian nasional komprehensif selama 12 bulan sejak Mei lalu atas 19 isu infrastruktur.

Chief Technology and Engineering Officer TNB Genco Shamsul Amri bin Sulaiman mengatakan, Malaysia berada di Fase Satu pendekatan tonggak IAEA. TNB membentuk satuan tugas nuklir pada 2023, yang menjadi kantor manajemen proyek pada 2025, sebelum kegiatannya dialihkan ke TNB Genco pada awal 2026. Perusahaan listrik milik negara itu menyiapkan diri menjadi calon pemilik sekaligus operator pembangkit nuklir pertama Malaysia. "Kesiapan adalah investasi strategis pertama kami," ujarnya.RPB

Sertifikasi Halal UMKM Ditunda Hingga 2028

SULTENG RAYA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebutkan penundaan pemberlakuan sertifikasi halal bagi UMKM hingga 2028 sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pesan Pak Presiden kepada kami untuk menunda batasan, seharusnya batas terakhirnya tanggal 18 Oktober kemarin. Presiden memahami dan mengerti bahwa cukup banyak aspirasi dari UMKM," katanya di Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad (25/10/2026).

Ia mengatakan, sejauh ini kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM belum memenuhi target sehingga dipandang perlu untuk melakukan penundaan. Sebab, sebagian besar pelaku UMKM, kata dia, menilai masih kesulitan memenuhi persyaratan dokumen.

Berdasarkan target kuota sertifikasi halal gratis (SEHATI) dari pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pada 2026 tersedia kuota sebanyak 1,35 juta sertifikat untuk UMKM. Kendati demikian, target tersebut belum tercapai hingga batas akhir 18 Oktober 2026.

"Selain memang target tidak tercapai, sebagian besar UMKM juga melihat momentumnya belum pas, karena masih dianggap cukup berat dan belum punya kemampuan menyiapkan dokumen-dokumen administrasinya. Maka dari itu, ditunda sampai dua tahun atau sampai tahun 2028," tuturnya.

Kendati demikian, Maman menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM bukan merupakan program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, melainkan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan batas akhir 18 Oktober 2026.

"Maka dari itu, karena Pak Presiden juga melihat masih banyak UMKM yang memang belum bisa memenuhi, dalam rangka untuk meringankan beban UMKM, Pak Presiden memerintahkan untuk menundanya sampai tahun 2028," tuturnya lagi. Oleh karena itu, pihaknya akan melihat sejauh mana efektivitas penundaan aturan ini serta menjalankan arahan presiden dengan mengkajinya dan mencari mekanisme jalan tengah agar mendapatkan solusi terbaik.

"Apa mekanisme jalan tengah itu? Mekanisme yang memang bisa mempertemukan dua sisi antara aspek perintah Undang-Undang terkait kewajiban halal dengan melihat faktor kemampuan dari UMKM-nya," ujarnya menekankan.

"Jangan sampai malah menjadi beban bagi UMKM. Ini lagi kita kaji, mudah-mudahan dalam waktu ke depan kita bisa temukan formulasi yang terbaik," ucap Maman menambahkan.

Penerapan kewajiban sertifikasi halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan bagi konsumen Muslim agar terhindar dari mengonsumsi produk yang tidak jelas kehalalannya. Selain merupakan amanah konstitusi, ketentuan ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Sebelumnya, Wakil Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Handi Risza, mengatakan pemerintah harus memberikan penjelasan menyeluruh terkait penundaan implementasi kewajiban sertifikasi halal. Handi menilai penundaan selama dua tahun harus menjadi bahan evaluasi serius lantaran publik berhak mempertanyakan sejauh mana pemerintah telah mempersiapkan implementasi kebijakan yang sebenarnya sudah direncanakan.

"Jangan sampai pemerintah menetapkan kewajiban, tetapi ketika mendekati batas waktu pelaksanaan, infrastruktur, pendampingan, anggaran, dan kapasitas sertifikasi ternyata belum memadai," ujar Handi saat dihubungi Republika di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Jika persoalannya adalah kesiapan pelaku usaha, terutama UMKM, Handi menyebut solusinya bukan sekadar menggeser tenggat waktu, melainkan memperbaiki kesiapan sistem secara menyeluruh. Handi tidak ingin penundaan kewajiban sertifikasi halal menjadi pola berulang yang melemahkan kepastian hukum dan mengurangi kepercayaan pelaku usaha.

"Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apa yang belum siap, siapa yang terdampak, apa dasar penundaannya, dan target konkret apa yang harus tercapai dalam dua tahun tersebut," lanjutnya.

Di sisi lain, Handi mengatakan kebijakan halal tidak boleh hanya mengejar kepatuhan formal tanpa mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha. Handi tidak ingin UMKM justru terbebani biaya, prosedur, dan birokrasi yang tidak proporsional akibat kebijakan tersebut.

"Jadi, yang perlu kita tuntut bukan semata-mata agar kewajiban segera diberlakukan tanpa pengecualian, melainkan agar pemerintah memiliki peta jalan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fleksibilitas dalam jadwal boleh saja, tetapi komitmen terhadap tujuan kebijakan tidak boleh melemah," ucap Handi.

Handi menyoroti empat tantangan utama penerapan kewajiban sertifikasi halal. Pertama, kesiapan dan kemampuan UMKM.

Handi menyampaikan bahwa pelaku usaha kecil menghadapi keterbatasan modal, pengetahuan, administrasi, dan akses pendampingan. Pemerintah, ucap dia, harus memastikan bahwa sertifikasi halal tidak menjadi hambatan bagi UMKM untuk tumbuh dan bersaing.

"Fasilitasi sertifikasi gratis harus tepat sasaran, prosesnya sederhana, dan pendampingannya benar-benar menjangkau usaha mikro hingga daerah terpencil," sambungnya.

Kedua, kapasitas ekosistem sertifikasi halal. Handi meminta pemerintah memastikan ketersediaan pendamping proses produk halal, auditor halal, lembaga pemeriksa halal, laboratorium yang diperlukan, serta layanan administrasi yang terintegrasi.

"Persoalannya bukan hanya jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga kecepatan, kualitas, konsistensi, dan keterjangkauan proses sertifikasi," ucap Handi.

Ketiga, koordinasi dan kepastian regulasi. Handi menyampaikan bahwa implementasi kebijakan halal harus melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BPJPH, pelaku usaha, serta lembaga terkait lainnya. Jika koordinasinya lemah, sambung dia, pelaku usaha akan menghadapi prosedur yang tumpang tindih dan informasi yang tidak konsisten.

"Pemerintah harus membangun satu sistem layanan yang mudah diakses, dengan pembagian tanggung jawab dan standar pelayanan yang jelas," ujar Handi.

Keempat, orientasi kebijakan yang tidak boleh berhenti pada kepatuhan administratif. Menurut Handi, sertifikasi halal seharusnya menjadi bagian dari strategi besar pengembangan industri halal nasional.

"Indonesia tidak cukup hanya menjadi pasar produk halal, tetapi juga harus mampu menjadi produsen, eksportir, dan pusat inovasi produk halal yang kompetitif di pasar global," kata Handi.RPB



LOGO Halal pada sebuah makanan ringan di Jakarta, Rabu (14/10/2026). **FOTO: REP**









Semangat Hari Pahlawan Meneguhkan Persatuan di Tengah Isu Penyadapan

PERINGATAN Hari Pahlawan menjadi pengingat bahwa persatuan merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan.

OLEH : MASAYU RAHMAT ANDI *)

SEMANGAT perjuangan yang diwariskan para pendahulu tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga fondasi penting untuk menjaga kedaulatan dan membangun masa depan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, nilai kepahlawanan menemukan makna baru melalui komitmen menjaga keamanan negara, menegakkan hukum, serta merawat kebersamaan masyarakat.

Sejarah telah membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan kolektif yang melampaui perbedaan suku, agama, dan golongan. Para pahlawan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Keteladanan tersebut tetap relevan hingga sekarang, ketika tantangan terhadap kedaulatan tidak lagi terbatas pada ancaman fisik, tetapi juga mencakup perlindungan informasi dan keamanan nasional di era digital.

Tema Hari Pahlawan 2026, Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan, menjadi ajakan untuk menerjemahkan semangat kepahlawanan ke dalam tindakan nyata. Persatuan bukan sekadar semboyan, melainkan kekuatan yang memungkinkan bangsa terus bergerak maju. Dalam pandangan Ketua Umum Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI), Meutia Farida Hatta Swasono, nilai cinta tanah air dan semangat membela bangsa yang diwariskan para pahlawan merupakan prinsip yang penting diteruskan kepada generasi muda. Melalui keteladanan tersebut, setiap generasi diharapkan mampu mengambil peran dalam menjaga martabat dan kemajuan Indonesia.

Semangat menjaga kedaulatan itu menemukan relevansinya dalam perkembangan situasi nasional saat ini. Pengungkapan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional oleh Bareskrim Polri menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan terhadap komunikasi strategis negara. Langkah penyidikan yang telah dilakukan menunjukkan adanya upaya penegakan hukum sekaligus membuka ruang pembenahan sistem keamanan informasi agar semakin andal dan akuntabel.

Perkembangan tersebut juga mengingatkan bahwa menjaga kedaulatan pada masa kini membutuhkan kesiapan menghadapi perubahan teknologi. Keamanan informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan nasional, terutama dalam melindungi komunikasi strategis dan memastikan penyelenggaraan negara berjalan dengan baik. Dalam konteks inilah, pandangan pakar keamanan siber Pratama Persadha mengenai pentingnya pengendalian akses, otorisasi, dan pengawasan internal patut menjadi perhatian. Penguatan sistem verifikasi berlapis dan mekanisme pengawasan dapat menjadi langkah konstruktif untuk meningkatkan ketahanan keamanan informasi nasional.

Di balik kemajuan teknologi, kekuatan utama bangsa tetap bertumpu pada integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab manusia yang menjalankannya. Sistem keamanan yang baik bukan hanya dibangun melalui perangkat modern, tetapi juga melalui tata kelola yang transparan serta kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, setiap perkembangan persoalan keamanan dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kualitas perlindungan terhadap kepentingan negara.

Upaya tersebut berjalan seiring dengan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Penanganan perkara secara objektif, transparan, dan profesional sebagaimana ditekankan Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menjadi bagian penting dalam memastikan kepastian hukum. Penghormatan terhadap proses penyidikan juga memberikan ruang bagi aparat untuk bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti, sehingga hasil penanganan perkara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kepercayaan terhadap institusi negara memiliki hubungan erat dengan kondusivitas nasional. Ketika penegakan hukum berjalan sesuai aturan dan komunikasi publik dilakukan secara terbuka, masyarakat memiliki landasan yang lebih kuat untuk menilai setiap perkembangan secara proporsional. Kondisi tersebut mendukung terciptanya ruang publik yang sehat sekaligus memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat.

Persatuan bangsa juga tercermin dari kedewasaan dalam menyikapi berbagai informasi. Perkembangan teknologi komunikasi memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pandangan. Kebebasan tersebut akan semakin bermanfaat apabila disertai tanggung jawab untuk menjaga kebenaran informasi, menghormati perbedaan pendapat, serta mengedepankan dialog yang konstruktif.

Semangat inilah yang sesungguhnya menjadi bagian dari warisan perjuangan para pahlawan. Persatuan tidak dibangun dengan menyeragamkan pandangan, melainkan melalui kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan Indonesia yang aman, berdaulat, dan sejahtera. Perbedaan dapat menjadi kekuatan ketika dikelola melalui sikap saling menghormati dan komitmen terhadap kepentingan nasional.

Momentum peringatan Hari Pahlawan, kebersamaan seluruh elemen bangsa menjadi modal penting untuk menjaga suasana yang damai dan produktif. Kondusivitas nasional memberikan ruang bagi pembangunan ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, dan berbagai kegiatan masyarakat untuk terus berkembang. Situasi yang stabil juga mendukung kesinambungan program pembangunan yang manfaatnya diharapkan semakin dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Meneruskan perjuangan para pahlawan bukan hanya tentang mengenang keberanian masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana bangsa ini menjaga hasil perjuangan tersebut. Penegakan hukum yang berkeadilan, penguatan keamanan nasional, dan persatuan masyarakat merupakan wujud pengabdian yang relevan dengan tantangan masa kini.

Momentum Hari Pahlawan 2026 menjadi kesempatan untuk meneguhkan optimisme bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam menghadapi setiap perubahan. Dengan semangat melangkah bersama, keteladanan para pahlawan dapat terus dihidupkan melalui kerja nyata, kepedulian, dan tanggung jawab bersama. Persatuan yang terjaga akan menjadi fondasi kokoh bagi Indonesia untuk melanjutkan perjuangan menuju bangsa yang semakin maju, aman, dan berdaulat. *)
Pelopor Gerakan Pemuda Bhinneka Tunggal Ika

Polemik Ijazah Gibran: Ancaman Krisis Moral & Keteladanan?

DALAM demokrasi, pemenuhan persyaratan pencalonan bukan sekadar urusan kelengkapan administrasi. Ia merupakan bagian dari kepatuhan terhadap aturan yang menjadi dasar seseorang memperoleh mandat untuk menduduki jabatan publik.

OLEH : H. RIVQY ABDUL HALIM

KARENA itu, ketika keabsahan dokumen persyaratan seorang pejabat negara dipersoalkan dan kemudian menjadi objek putusan pengadilan, persoalannya tidak lagi berhenti pada dokumen semata. Ada persoalan etika publik, keteladanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang perlu dijawab secara terbuka.

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 menjadi perkembangan penting dalam persoalan ini. Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan judex facti, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Perkara tersebut berkaitan dengan keabsahan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang menjadi bagian dari persoalan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Putusan ini perlu dihormati sebagai produk peradilan, dengan konsekuensi hukum yang harus dibaca berdasarkan amar dan pertimbangan hukum secara utuh.

Dalam konteks hukum administrasi negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membedakan keputusan yang tidak sah dengan keputusan yang dapat dibatalkan. Pasal 70 mengatur keputusan yang tidak sah karena persoalan kewenangan, pelampauan kewenangan, atau tindakan sewenang-wenang. Akibat hukumnya, keputusan tersebut tidak mengikat sejak ditetapkan dan akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada. Sementara itu, Pasal 71 mengatur keputusan yang dapat dibatalkan karena cacat prosedur atau substansi, dengan akibat hukum sejak keputusan pembatalan ditetapkan atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembedaan tersebut penting untuk memahami akibat hukum putusan MA. Istilah "batal" dan "dibatalkan" tidak seharusnya ditafsirkan secara terpisah dari dasar hukum, pertimbangan hakim, serta amar putusan secara utuh. Penentuan apakah akibat hukumnya berlaku surut (ex tunc) atau berlaku sejak pembatalan (ex nunc) harus merujuk pada konstruksi hukum yang digunakan oleh MA dalam perkara tersebut. Dengan demikian, putusan itu tidak boleh disederhanakan menjadi sekadar persoalan perubahan status sebuah dokumen, tetapi juga harus dilihat konsekuensinya terhadap tata kelola administrasi dan persyaratan pencalonan pejabat publik.

Selain putusan MA, terdapat pula Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, yang salah satu pokok perkaranya mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi calon Wakil Presiden. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. MK juga menilai certificate of attendance, catatan akademik, dan dokumen lain yang terungkap dalam persidangan tidak menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan sebatas menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran.

Rangkaian putusan MA dan MK tersebut memperlihatkan adanya persoalan hukum yang memiliki dimensi lebih luas dari pada sengketa dokumen. Ketika sebuah dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, sementara pejabat yang bersangkutan telah menduduki jabatan negara, maka negara perlu memastikan bahwa konsekuensi hukumnya tidak dibiarkan menggantung. Di sinilah DPR memiliki tanggung jawab kelembagaan untuk menilai apakah terdapat persoalan konstitusional yang perlu ditindaklanjuti.

Sesuai ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 telah menyediakan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Proses tersebut dapat dimulai melalui pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat DPR kemudian diperiksa dan diputus oleh MK. Apabila dinyatakan terbukti, diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi.

Dalam konteks ini, Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), termasuk Pasal 79 ayat (4) huruf c, dapat menjadi salah satu mekanisme yang dipertimbangkan. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara. Mekanisme ini bukan keputusan pemberhentian secara sepihak, melainkan pintu masuk bagi proses konstitusional yang melibatkan MK dan MPR.

DPR tidak perlu menempatkan dirinya sebagai pengadilan yang mengulang pemeriksaan atas objek sengketa administrasi yang telah diputus MA. Namun, DPR tetap memiliki kewenangan untuk menilai relevansi putusan tersebut terhadap persyaratan konstitusional Wakil Presiden. Proses itu harus dilakukan dengan mengacu pada putusan pengadilan, ketentuan perundang-undangan, serta bukti yang sah dan relevan sebagaimana dipersyaratkan dalam UU MD3. Dengan demikian, penghormatan terhadap putusan pengadilan tetap berjalan seiring dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.

Sikap DPR menjadi penting karena persoalan ini menyangkut standar yang seharusnya berlaku bagi setiap orang yang menduduki jabatan publik. Apabila putusan pengadilan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan tidak memperoleh tindak lanjut kelembagaan yang jelas, ruang ketidakpastian akan terus terbuka. Perdebatan mengenai legitimasi Wakil Presiden berpotensi berlangsung berkepanjangan, sementara masyarakat menunggu kepastian apakah hukum benar-benar menjadi rujukan yang sama bagi seluruh pemegang kekuasaan.

Kepatuhan terhadap persyaratan hukum apakah dipandang sebagai beban administratif yang dapat diselesaikan setelah seseorang memperoleh jabatan? Justru, semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar tuntutan agar seluruh persyaratan pencalonannya dapat dipertanggungjawabkan. Sebab keteladanan seorang pemimpin tidak hanya tercermin dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari kesediaannya tunduk pada aturan yang berlaku. *Penulis: Ketua Umum DKP Panji Bangsa, Anggota DPR RI F-PKB **Jawa Pos*

TAJUK



Jangan Biarkan Inflasi makin Berlari

INFLASI memang belum menjadi momok yang menggentarkan perekonomian nasional. Namun, bukan berarti pemerintah boleh bersantai. Apalagi, tanda-tanda peningkatan tekanan harga mulai terlihat. Jika tidak segera diantisipasi, inflasi yang hari ini masih terkendali bisa berubah menjadi persoalan serius bagi daya beli masyarakat.Buku Ekonomi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Oktober 2026 sebesar 3,23%, lebih tinggi daripada Oktober 2025 yang sebesar 2,86%. Kenaikan itu patut menjadi alarm kewaspadaan, terutama karena sumber tekanan inflasi bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan dengan andil 1,40 poin persentase. Berikutnya kelompok transportasi sebesar 0,59 poin persentase serta perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,32 poin persentase.

Sejumlah komoditas pangan, seperti cabai rawit, ikan segar, beras, minyak goreng, dan daging, menjadi pendorong dominan inflasi. Semuanya merupakan kebutuhan yang sulit dihindari masyarakat, terutama rumah tangga berpendapatan rendah.

Karena itu, inflasi tidak cukup dibaca sebagai deretan angka statistik. Di balik setiap kenaikan harga, ada keluarga yang mesti mengurangi belanja, memangkas konsumsi, bahkan mengorbankan kebutuhan lain demi mempertahankan dapur tetap mengepul. Buku Ekonomi

Memang, inflasi 3,23% masih berada dalam rentang sasaran pemerintah sebesar 2,5% plus-minus 1%. Akan tetapi, posisinya sudah mendekati batas atas. Ruang untuk membiarkan harga terus merangkak naik semakin sempit.

Kita mengingatkan pemerintah agar tidak terlena oleh predikat inflasi terkendali. Justru ketika situasi belum mengkhawatirkan, langkah pencegahan harus dilakukan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih konsisten.

Pengendalian harga pangan mesti menjadi prioritas. Pemerintah harus memastikan produksi mencukupi, distribusi lancar, stok tersedia, serta praktik penimbunan dan permainan harga ditindak tegas. Operasi pasar jangan sekadar menjadi ritual ketika harga telanjur melonjak.Cek Layanan

Koordinasi pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan harus diperkuat. Stabilitas harga tidak boleh bergantung pada langkah dadakan yang hanya meredakan gejala, tetapi gagal menyelesaikan persoalan struktural.

Lebih jauh, pengendalian inflasi mesti berjalan beriringan dengan upaya menjaga pendapatan dan daya beli masyarakat. Sebab, harga yang stabil tidak banyak berarti apabila kemampuan masyarakat untuk membeli terus melemah.

Kita mendorong pemerintah bekerja lebih keras agar inflasi tidak hanya bertahan dalam rentang sasaran, tapi juga dapat ditekan di bawah titik tengah target secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan kesejahteraan produsen.

Jangan menunggu inflasi berlari semakin kencang baru sibuk mengejarnya. Dalam urusan harga kebutuhan pokok, keterlambatan bertindak selalu memiliki ongkos sosial yang mahal.Buku Ekonomi

Pada akhirnya, keberhasilan mengendalikan inflasi bukan semata prestasi angka makroekonomi, melainkan juga kemampuan negara menjaga ketenteraman hidup rakyat. Itulah ukuran sesungguhnya keberpihakan kebijakan ekonomi.*Media Indonesia*

TRIMEDIA GROUP
PENERBIT:
PT. Trimedia Sulteng Mandiri
No. Rek. Bank Sulteng, An. **PT. Trimedia Sulteng Mandiri**
Acc. 0010107770011, Rek.BSI No. 7282773443 a.n. PT. Trimedia Sulteng Mandiri
Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205223-6
An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI
PERWAKILAN JAKARTA: Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan
(Ahmad Averus Toana, Sudarsono, Syafii, Agung Ramadhan)
PERCETAKAN: **TRIMEDIA GROUP**
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

WARTAWAN **HARIAN SULTENG RAYA**, DIBEKALI KARTU **PERS**/SURAT TUGAS DAN NAMANYA TERCANTUM DALAM **BOX REDAKSI**

PENDIRI/PIMPINAN UMUM: Tri Putra Toana. **DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA :** Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara.
PIMPINAN PERUSAHAAN: Suyanto. **PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB:** Irwan.
REDAKTUR: Amiluddin, Andi Nurhidayat, Rahmat Kurniawan. **STAF REDAKSI:** Irwan, Andi Nurhidayat, Amiluddin, Amar Sakti, Andi Besse Rahmat Kurniawan, Helmy Jatmika. **SEKRETARIS REDAKSI:** Jane Lestari Parabak
LITBANG: A. Madukelleng, Fery, Hangga Nugracha. **BIRO DONGGALA:** Wahid Agus. **BIRO SIGI:** Feri Fadli. **BIRO PARMOUT:** Aslan Laeho. **BIRO TOUNA:** Budi.
BIRO POSO: Syamsuyadi. **BIRO BALUT:** - **BIRO MOROWALI:** Intan. **BIRO MOROWALI UTARA:** Ivan Tagora. **BIRO TOLITOLI:** Rustam.
BIRO BANGKEP: Pariaman Tambunan (Kepala Biro). **BIRO BANGGAI:** Pariaman T.
DESIGN & ARTISTIK: Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. **PEMASARAN/SIRKULASI:** Narwanro, Zainuddin L, Eko Margianto. **KEUANGAN:** Febrianti.
EMAIL: sultengraya7th@gmail.com, sultengraya@gmail.com **TARIF IKLAN:** Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk.
ALAMAT REDAKSI: Jl. Rusa No. 36 **TLP:** 0451 4012 445 **ALAMAT PERCETAKAN:** Jl. Rusa No.36 Palu.

Petani Alpukat Tumbuh Bersama Klasterku Hidupku BRI



FOTO: DOK. BRI

SULTENG RAYA – Dari kebun-kebun warga di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Lampung, alpukat menjadi salah satu komoditas unggulan yang terus memberi nilai tambah ekonomi bagi petani sekitar.

Peluang itu semakin besar ketika hasil panen dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan terserap dengan baik.

Bagi petani di Sumberejo, potensi tersebut ditopang oleh kualitas buah yang mereka hasilkan. Alpukat dari wilayah ini dikenal memiliki daging lembut dan tekstur lembut dan kaya rasa, sehingga diminati konsumen. Namun, tantangan muncul ketika panen raya tiba, saat hasil kebun meningkat dalam waktu hampir bersamaan, sementara petani membutuhkan lebih banyak pembeli agar alpukat yang dipanen dapat terserap dengan baik.

Persoalan itu dipahami betul oleh salah satu penggerak kelompok tani alpukat, Prayitno. Berangkat dari pengalaman sebagai petani, ia merasakan sendiri bagaimana hasil panen yang sudah dirawat berbulan-bulan tetap membutuhkan jalur pemasaran yang jelas agar nilainya bisa terjaga.

"Saya berangkat dari petani, jadi paham betul tantangannya. Petani sudah menanam, merawat, lalu ketika panen yang dipikirkan berikutnya ya bagaimana hasil ini bisa terjual dengan baik. Karena itu kami coba berkembang bersama, merangkul petani di sekitar supaya hasil panennya bisa sama-sama kita pasarkan," cerita Prayitno.

Dari sana, Prayitno mulai mencari jalan agar hasil kebun petani di lingkungannya dapat dipasarkan lebih luas. Ia pun menghimpun alpukat dari sejumlah petani untuk kemudian dibawa ke pasar induk. Langkah yang semula berangkat dari kebutuhan pemasaran perlahan berkembang menjadi jaringan usaha bersama petani di sekitarnya.

Seiring hubungan itu berjalan, Prayitno semakin memahami kebutuhan petani tidak selalu berhenti pada saat panen. Ada kalanya mereka juga membutuhkan dukungan untuk menjaga kegiatan budi daya tetap berjalan hingga musim berikutnya. Dalam kondisi tertentu, Prayitno turut membantu kebutuhan modal petani yang menjadi mitranya.

"Kalau ada petani yang butuh modal, kadang kami bantu. Karena kalau petaninya bisa terus jalan, hasilnya juga bisa terus kami pasarkan bersama. Jadi memang kami tumbuhnya dari lingkungan sendiri," lanjutnya.

Pola tersebut membuat usaha alpukat di Sumberejo berkembang dengan saling menopang. Petani tetap fokus merawat kebun dan menjaga kualitas buah, sementara jaringan pemasaran terus dibangun agar hasil panen memiliki lebih banyak jalan menuju pembeli.

Oleh karena itu, Prayitno terus mencari peluang untuk memperbesar jaringan pemasaran. Hal ini karena luasnya pasar menentukan seberapa jauh hasil kerja di kebun dapat memberikan nilai. Semakin banyak pembeli yang dapat dijangkau, semakin besar pula peluang hasil panen terserap, modal kembali berputar, dan usaha dapat dilanjutkan pada musim berikutnya.

Bersama kelompok tani di wilayahnya, ia kemudian terhubung dengan program Klasterku Hidupku dari BRI. Hubungan tersebut bermula ketika BRI melakukan survei kepada kelompok tani dan membuka peluang kerja sama.

Melalui Klasterku Hidupku, ruang untuk memperluas jaringan usaha semakin terbuka. Dukungan tersebut menjadi penting karena bertambahnya akses pasar akan ikut memperbesar kemampuan kelompok dalam membawa hasil kebun petani Sumberejo kepada lebih banyak pembeli.

Perkembangan itu mulai tercermin dari sisi usaha. Prayitno menyebut omzet dan penjualannya menunjukkan tren peningkatan. Ketika ditanya mengenai besarannya, ia memperkirakan pertumbuhan tersebut mencapai sekitar 30%.

Bagi Prayitno, kenaikan tersebut ikut membuka ruang untuk membawa lebih banyak hasil panen petani ke pasar. Ketika jaringan penjualan bertambah, kemampuan untuk menampung hasil kebun warga juga ikut berkembang. Dari satu petani ke petani lain, pertumbuhan usaha perlahan menjadi peluang bersama.

Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan bahwa melalui program Klasterku Hidupku, BRI terus mendorong kelompok usaha berbasis potensi lokal agar semakin kuat dari sisi kapasitas usaha, jaringan, dan akses pasar.

"Potensi ekonomi daerah akan semakin kuat ketika pelaku usaha di dalamnya dapat tumbuh bersama. Dengan demikian, pengembangan klaster tidak hanya diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga bagaimana membuka akses pasar, memperkuat jaringan usaha, dan menciptakan lebih banyak peluang agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan masyarakat di sekitarnya," ujar Dhanny.

Hingga September 2026, BRI telah mengembangkan lebih dari 45 ribu klaster usaha di berbagai daerah melalui program Klasterku Hidupku sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem usaha produktif berbasis komunitas. RHT

Jogjastory Kembangkan Usaha bersama linkumkm by BRI

SULTENG RAYA – Berawal dari ide membuat kemeja untuk bersepeda saat pandemi, Sri Utami kini mengembangkan Jogjastory menjadi usaha fesyen yang mengangkat cerita dan budaya Yogyakarta melalui wastra.

Di bawah PT Jayasri Samahita Utama, Jogjastory memadukan katun organik bermotif khas Yogyakarta dengan lurik hasil kolaborasi bersama perajin lokal. Salah satu produk yang diminati pelanggan adalah outer.

Pada awal merintis usaha, Sri memasarkan kemeja bergaya kasual dan urban melalui sistem pre-order. Minat pelanggan yang berkembang mendorongnya memperluas lini produk, tidak lagi terbatas pada kemeja. Pada 2023, ia mulai mengurus legalitas usaha sekaligus mengembangkan Jogjastory sebagai bisnis fesyen dengan ragam produk yang lebih luas.

"Jogjastory berawal saat pandemi, ketika saya banyak beraktivitas di luar rumah dengan bersepeda. Dari situ muncul ide membuat kemeja yang nyaman dipakai bersepeda, tetapi tetap bergaya kasual dan urban. Awalnya saya memasarkannya melalui sistem pre-order. Setelah peminatnya bertambah, pada 2023 saya mulai mengurus legalitas usaha dan mengembangkan produk di luar kemeja," ujar Sri.

Bagi Jogjastory, budaya Yogyakarta bukan sekadar inspirasi desain, melainkan bagian dari identitas produk. Motif yang mengangkat cerita daerah dibuat melalui lukisan tangan, kemudian didigitalisasi untuk diaplikasikan pada kain katun organik. Sri juga berkolaborasi dengan perajin lokal untuk menghadirkan lurik dalam koleksinya, memadukan unsur tradisi dengan desain modern yang dapat dikenakan dalam keseharian.

Jogjastory memasarkan produknya melalui konsinyasi di sejumlah hotel dan galeri, pameran, serta kanal digital seperti Tokopedia, Shopee, Instagram, dan WhatsApp. Pelanggannya berasal dari Yogyakarta, berbagai daerah lain, hingga luar Pulau Jawa. Usaha ini kini didukung tiga pekerja, tetapi kapasitas produksi masih menjadi tantangan ketika menerima pesanan dalam jumlah besar. Untuk transaksi di pameran, Sri juga memanfaatkan QRIS BRI sebagai pilihan pembayaran bagi pelanggan.

"Saya mengenal linkumkm by BRI melalui Instagram. Saya melihat BRI sebagai bank BUMN yang mendukung UMKM agar bisa maju, tumbuh, dan berkembang hingga naik kelas. Melalui linkumkm by BRI, saya juga mendapatkan banyak wawasan dan pengetahuan baru dari para mentor," tutur Sri.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan, pengembangan UMKM memerlukan dukungan yang tidak hanya mencakup pembiayaan, tetapi juga peningkatan kapasitas dan akses terhadap peluang pasar.

"UMKM yang kuat merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, BRI melalui linkumkm by BRI terus memperluas perannya, bukan hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai mitra pertumbuhan yang mendorong UMKM untuk semakin terhubung, kompetitif, dan siap menembus pasar yang lebih luas," pungkas Dhanny.

Hingga 30 September 2026, linkumkm by BRI mencatat lebih dari 17,66 juta pengguna dan menyediakan 845 modul pembelajaran untuk mendukung pengembangan kapasitas pelaku UMKM. Melalui platform ini, pelaku usaha dapat mengikuti asesmen untuk mengenali tingkat perkembangan usaha, mengakses pembelajaran sesuai kebutuhan, serta memperoleh pendampingan mentor sebagai bekal untuk mengembangkan usaha dan memperluas peluang pasar. RHT



SALAH satu produk Jogjastory. FOTO: DOK. BRI

BTN Ajak Generasi Muda Siapkan Masa Depan Industri Perumahan Indonesia

SULTENG RAYA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus mendorong lahirnya inovasi dan wirausahawan baru untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional.

Melalui BTN Housingpreneur Batch 3, BTN mengajak generasi muda, khususnya kalangan mahasiswa dan akademisi, untuk mengembangkan gagasan serta menciptakan solusi yang dapat menjawab berbagai tantangan industri perumahan di Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BTN Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Bali Nusra) Bagus Hendri Setiawan mengatakan, sektor perumahan memiliki peluang pengembangan bisnis yang sangat luas. Sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, BTN ingin mendorong keterlibatan berbagai pihak. Termasuk kalangan akademisi, untuk bersama-sama memikirkan masa depan sektor tersebut.

Menurut Bagus, pengembangan industri perumahan tidak bisa hanya mengandalkan peran perbankan. Dibutuhkan kontribusi berbagai disiplin ilmu dan keahlian untuk melahirkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, BTN Housingpreneur menjadi salah satu wadah untuk mempertemukan gagasan dari kalangan akademisi dengan kebutuhan dunia industri.

"Kami tidak datang dengan membawa solusi, tetapi justru ingin bertanya kepada teman-teman, solusi apa yang kalian punya," ujar Bagus saat roadshow BTN Housingpreneur Batch 3 di Universitas Brawijaya (UB), Malang, Senin (2/11).

Dia menjelaskan, sektor perumahan memiliki lebih dari 174 subsektor turunan. Yang mana membuka peluang bagi lahirnya berbagai jenis usaha. Tidak terbatas pada pembangunan rumah, tetapi juga mencakup desain, teknologi digital, material bangunan, hingga beragam jasa pendukung yang berkaitan dengan kebutuhan hunian.

Dengan cakupan industri yang luas, mahasiswa dari berbagai latar belakang keilmuan memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Bahkan, bagi yang belum memiliki bisnis, produk, maupun konsep usaha yang matang. Mereka tetap dapat mulai mengembangkan gagasan melalui BTN Housingpreneur.

Dalam BTN Housingpreneur Batch 3, BTN menargetkan sekitar 1.500 submission atau pengajuan ide inovasi. Pendaftaran program dibuka mulai 28 September hingga 30 November 2026. Meski demikian, BTN tidak hanya berorientasi pada jumlah peserta. Namun, juga menitikberatkan kualitas gagasan, proses pengembangan, serta potensi dampaknya bagi masyarakat.

Bagus mengatakan, selain mengikuti kompetisi, peserta juga memperoleh berbagai fasilitas untuk mengembangkan ide menjadi peluang bisnis yang berkelanjutan. Antara lain, mentoring dan coaching bersama praktisi berpengalaman, pendampingan penyusunan model bisnis melalui business model canvas, hingga networking dan business matching dengan pelaku industri yang relevan.

Dengan berbagai dukungan tersebut, BTN berharap ide-ide yang lahir dari kalangan mahasiswa dan akademisi tidak berhenti sebagai gagasan atau prototipe. Tetapi dapat dikembangkan menjadi produk maupun solusi yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Jangan takut apabila ide kalian masih kecil, belum punya bisnis, atau prototipenya belum sempurna. Sesuatu yang besar selalu dimulai dari sebuah ide," pesan Bagus.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Brawijaya, Setiawan Noerdajasakti, menyambut positif penyelenggaraan BTN Housingpreneur Batch 3 di kampusnya. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan sekaligus mengembangkan pola pikir kewirausahaan.

Setiawan menilai, keterlibatan BTN dalam mendorong kewirausahaan mahasiswa melalui sektor perumahan menjadi kesempatan menarik. Terlebih, industri properti dan perumahan memiliki prospek pengembangan yang luas dan berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat di masa depan.

"Jarang sekali ada badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan di bidang wirausaha, tetapi arah kegiatannya mengajak mahasiswa untuk berpikir jauh ke depan hingga menjangkau dunia properti dan masa depan, serta menemukan peluang menciptakan hunian yang layak dan terus tumbuh," jelas Setiawan.

Setiawan berharap, mahasiswa Universitas Brawijaya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali potensi dan mengembangkan ide-ide kreatif. Kehadiran BTN di lingkungan kampus menjadi peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan perspektif baru mengenai dunia usaha. Sekaligus membuka jalan menuju dunia industri.

Melalui semangat Let's Build the Future of Housing Together, BTN Housingpreneur Batch 3 diharapkan mampu menjaring lebih banyak inovator muda yang dapat berkontribusi dalam pengembangan ekosistem perumahan nasional. Inisiatif ini sekaligus menjadi upaya BTN mendorong lahirnya solusi hunian yang semakin terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan. */RHT



Daftar 6 Tim ASEAN Tanpa FIFA Matchday November



TIMNAS Indonesia memilih menggelar TC pada FIFA Matchday November. **FOTO: CNN INDONESIA/ADI IBRAHIM**

SULTENG RAYA - Sebanyak enam tim negara Asia Tenggara atau ASEAN tidak menggelar pertandingan pada FIFA Matchday November.

Periode FIFA Matchday November sejatinya berlangsung pada 9 sampai 17 November. Setiap tim negara umumnya mendapatkan kesempatan bertanding dua kali.

Hasil dua pertandingan pada FIFA Matchday tersebut akan berpengaruh pada ranking FIFA masing-masing tim nasional.

Kendati begitu, enam tim negara ASEAN memilih tidak melangsungkan pertandingan pada jendela terakhir FIFA Matchday tahun ini.

Kelima tim tersebut adalah: Timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Timor Leste.

Indonesia jadi tim dengan ranking FIFA paling tinggi dalam daftar negara Asia Tenggara yang tidak memiliki FIFA Matchday November dengan berada di peringkat ke-116. Filipina di posisi ke-136, Myanmar ke-159, Kamboja ke-177, Laos ke-188, dan Timor Leste paling buncit di posisi ke-202.

Timnas Indonesia sendiri tidak memiliki pertandingan persahabatan pada FIFA Matchday November setelah batal duel dengan Yordania di Amman pada 13 November.

Skuad Garuda sempat mendekati Hong Kong sebagai pengganti, akan tetapi PSSI akhirnya memilih menggelar pemusatan latihan atau TC di Bali selama periode FIFA Matchday.

Kondisi ini jadi dua kali secara beruntun Timnas Indonesia tidak memiliki FIFA Matchday November, yakni pada 2025 dan 2026.

Sementara tim-tim ASEAN lain seperti Vietnam beruji coba dengan Taiwan dan Kirgistan. Thailand memiliki jadwal dengan Brunei Darussalam dan Oman atau Tajikistan.

Singapura jadi tim Asia Tenggara yang paling disorot dalam FIFA Matchday November karena melawan Paraguay dan Brasil. Sedangkan Malaysia berduel dengan China dan Yaman. CNN

Daftar 6 Tim ASEAN Tanpa FIFA Matchday November:

- Indonesia
- Filipina
- Kamboja
- Laos
- Timor Leste
- Myanmar.

SEKOLAH dari halaman 1

Menurutnya, model dan kurikulum pendidikan yang diterapkan di SR akan menjadi bekal lahirnya generasi emas 2045.

"Gedung yang kita bangun ini suatu saat bisa rusak, tetapi ilmu yang dibangun di dalam gedung ini tidak akan pernah mati," ucapnya tegas.

Bahkan, melalui program beasiswa kuliah BERANI Cerdas, Gubernur Anwar Hafid menyatakan komitmen pemerintah provinsi membiayai lulusan SR untuk kuliah di universitas terbaik di dalam hingga luar negeri.

"Kalau perlu sampai ke luar negeri, saya biayai. Kita ingin Sulawesi Tengah maju dengan ilmu," tandasnya.

Terlebih khusus, Gubernur menaruh perhatian kepada siswa-siswi SR yang bercita-cita menjadi dokter agar dibimbing secara khusus dalam mempersiapkan diri mengikuti seleksi masuk jurusan kedokteran.

Karena pemerintah provinsi lanjutnya memiliki program mencetak 1.000 dokter setiap tahun guna mendukung program BERANI Sehat.

Turut hadir di acara, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Anggota DPRD Sulteng Hidayat Pakamundi, Plt Kadis Sosial Kiki Rezqi Ramdaniasari, kepala perangkat daerah lingkup provinsi, kepala satker K/L, kepala SR Terintegrasi 20 Tadulako Nambaso dan mitra terkait. *WAN

PEMKAB dari halaman 1

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam Malam Apresiasi Anugerah Cita Negeri 2026 di Studio 1 KompasTV, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat.

Untuk Kabupaten Sigi, penghargaan diterima Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sigi, Nuim Hayat yang hadir mewakili Bupati Mohamad Rizal Intjenae.

Bupati tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut karena sedang menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci.

Anugerah Cita Negeri merupakan program apresiasi KompasTV kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki kinerja dan inovasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penilaian penghargaan ini mencakup sejumlah aspek, di antaranya pembangunan inklusif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kemajuan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap upaya Pemkab Sigi dalam menjalankan program pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan daerah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Capaian ini diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat inovasi, serta mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Sigi dapat berjalan semakin merata dan inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. FRY

REALISASI dari halaman 1

sama tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan secara triwulanan investasi di daerah itu menunjukkan tren peningkatan. Pada triwulan I 2026, realisasi investasi tercatat sebesar Rp32,10 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp36,60 triliun pada triwulan II dan kembali naik menjadi Rp47,31 triliun pada triwulan III.

Realisasi investasi triwulan III tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang 2026, dengan pertumbuhan sebesar 29,27 persen dibandingkan triwulan II yang tumbuh sekitar 14 persen.

Dari total investasi tersebut, penanaman modal asing (PMA) masih mendominasi dengan nilai sekitar Rp110 triliun atau berkontribusi sebesar 94,80 persen. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat sekitar Rp6 triliun atau 5,20 persen.

PMA di Sulteng juga mengalami pertumbuhan sebesar 20,42 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Ia mengatakan meski menunjukkan capaian investasi yang tinggi, struktur penanaman modal di Sulteng masih terkonsentrasi pada sektor industri logam dasar dan barang logam yang mencapai Rp93,15 triliun atau sekitar 80,30 persen dari total investasi.

Menurut dia, kondisi tersebut mendorong pemerintah provinsi setempat memperluas sektor tujuan investasi, terutama pada bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dinilai memiliki potensi sumber daya alam cukup besar.

Rifani mengatakan pengembangan investasi di sektor non-tambang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi Sulteng tidak hanya bertumpu pada aktivitas pertambangan dan industri pengolahan logam dasar.

Ia menyebut potensi sumber daya alam di sektor lain perlu dioptimalkan melalui pengembangan industri pengolahan sehingga mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

"Sulawesi Tengah tentunya tidak hanya fokus pada sektor pertambangan. Kami berharap sektor lain juga bisa dikembangkan, seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan karena potensi perikanan kita cukup besar," ujar dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan DPMPTSP Sulteng berupaya memberikan kemudahan pelayanan perizinan bagi perusahaan maupun pelaku usaha yang berminat menanamkan modal di daerah itu, termasuk pada sektor-sektor yang selama ini belum menjadi penyumbang utama investasi.

Berdasarkan data DPMPTSP Sulteng, kontribusi sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan terhadap total investasi pada Januari-September 2026 baru mencapai Rp615,72 miliar atau sekitar 0,53 persen.

Sementara itu, sektor perikanan menyumbang investasi sebesar Rp39,41 miliar atau sekitar 0,03 persen dari keseluruhan realisasi investasi.

Ia juga mengatakan masuknya investasi ke Sulteng selama periode tersebut turut memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Sebanyak 25.436 tenaga kerja Indonesia terserap, bertambah 3.107 orang atau tumbuh 13,91 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 22.329 orang. ANT

BUPATI dari halaman 1

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Apabila seluruh ruas jalan belum dapat diselesaikan pada 2027, pengerjaannya akan dilanjutkan pada 2028.

"Jadi kita lihat dulu kekuatan daerah. Kalau tidak bisa semua, nanti dilanjutkan di tahun 2028," ujar dia.

Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan, termasuk penyediaan akses jalan yang memadai untuk menunjang kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, peningkatan infrastruktur jalan juga menjadi salah satu upaya memperlancar konektivitas antarwilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Bungku Selatan.

Ia berharap pengaspalan jalan tersebut dapat memperlancar mobilitas warga sekaligus meningkatkan aksesibilitas masyarakat di daerah ini. ANT

POLISI dari halaman 1

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sembilan paket plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 1,62 gram.

Selain itu, petugas turut mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Penindakan yang berlangsung sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi itu berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran sabu yang kerap terjadi di wilayah Desa Pelawa.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Operasional (Opsnal) Satresnarkoba Polres Parigi Moutong melakukan pengumpulan bahan keterangan dan penyelidikan.

Setelah informasi dinilai cukup, petugas kemudian bergerak melakukan penindakan terhadap seorang pria yang diketahui berinisial RSL.

Petugas selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku dengan disaksikan dua orang aparat desa setempat.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sembilan paket yang diduga sabu, satu timbangan digital, satu alat isap atau bong, satu kotak kecil bening, satu dompet berwarna cokelat serta kartu tanda penduduk (KTP).

Dari hasil pemeriksaan awal, RSL mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya di wilayah Kelurahan Kayumalue, Kota Palu.

Narkotika itu rencananya akan diedarkan kembali di wilayah Kecamatan Parigi Tengah, sementara sebagian lainnya diakui untuk dikonsumsi sendiri.

Seluruh barang bukti kemudian disita dan diamankan bersama terduga pelaku ke Markas Komando (Mako) Polres Parigi Moutong guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

RSL yang diketahui merupakan warga Desa Pelawa tersebut kini harus mempertanggungjawabkan dugaan perbuatannya.

Penyidik menjerat yang bersangkutan dengan Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara.

Kapolres Parigi Moutong AKBP Heri Endrino Sihombing, melalui Kasat Resnarkoba IPTU Nicho Eliezer, menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Parigi Moutong.

Menurutnya, upaya pemberantasan narkoba tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga membutuhkan konsistensi aparat serta keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian.

"Komitmen kami jelas, Satresnarkoba Polres Parigi Moutong akan terus melakukan upaya pemberantasan narkoba sampai ke akar-akarnya. Kami tidak ingin narkotika merusak generasi muda dan mengancam masa depan masyarakat, khususnya di Kabupaten Parigi Moutong," tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. AJI

PENINDAKAN dari halaman 1

Dua penindakan yang berlangsung dalam rentang waktu beberapa jam tersebut berujung pada diamankannya dua orang terduga pelaku, masing-masing seorang pria dan seorang perempuan.

Dari kedua lokasi, polisi menyita total 20 plastik klip kecil yang diduga berisi sabu-sabu.

Penindakan pertama berlangsung pada Jumat (6/11/2026) sekitar pukul 23.00 WITA di Lorong Banteng, Dusun I, Desa Tolai. Personel Polsek Torue yang dipimpin langsung Kapolsek Torue IPTU Ramlin, mengamankan seorang pria berinisial IWP (41), warga Desa Purwosari, Kecamatan Torue.

Dalam penindakan tersebut, petugas menemukan enam plastik klip kecil yang diduga berisi sabu-sabu. Selain itu, turut diamankan empat plastik klip kosong, dompet, tas selempang, kartu ATM, uang tunai, serta sejumlah barang pribadi lainnya.

Belum berselang lama, aparat kepolisian kembali melakukan penindakan di kawasan yang sama. Kali ini, sasaran petugas adalah sebuah rumah kos di Lorong Banteng, Dusun I, Desa Tolai, pada Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 02.30 WITA.

Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan seorang perempuan berinisial NKA (46), warga Desa Tolai, Kecamatan Torue.

Petugas menemukan 14 plastik klip kecil yang diduga berisi sabu-sabu, tiga pak plastik klip bening kosong, empat kaca pireks, empat korek gas, serta sejumlah barang lainnya.

Dua penindakan tersebut menambah catatan pengungkapan kasus narkotika di wilayah hukum Polsek Torue.

Sebanyak 20 plastik klip kecil yang diduga berisi sabu-sabu kini telah diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut.

Kapolsek Torue IPTU Ramlin, menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan langkah penindakan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polsek Torue. Penindakan ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam menjaga keamanan masyarakat sekaligus melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Kami juga akan mendalami kasus ini untuk mengetahui asal-usul barang bukti dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat," tegas IPTU Ramlin.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap lingkungan sekitar. Informasi sekecil apa pun yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika diharapkan dapat disampaikan kepada pihak kepolisian.

Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Sinergi tersebut dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan terbebas dari ancaman narkotika.

Saat ini, kedua terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Torue untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Selama pelaksanaan penindakan, situasi berlangsung aman dan kondusif tanpa adanya perlawanan.

Polres Parigi Moutong mengimbau masyarakat agar berperan aktif membantu kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. AJI

SULTENG RAYA
PALU NHGHYA

Mahasiswa Untad Harumkan Sulteng, Raih Prestasi Nasional di TIMPINAS 2026



TIM HIMATER Untad foto bersama usai mengukir prestasi di tingkat nasional. **FOTO: DOK IST**

SULTENG RAYA–Dua tim utusan Himpunan Mahasiswa Peternakan (HIMATER) Universitas Tadulako (Untad) dari Jurusan Peternakan dan Sosial Ekonomi Peternakan, Fakultas Peternakan dan Perikanan, sukses menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Silver Medal dan Juara 2 dalam ajang Pertemuan Ilmiah Mahasiswa Peternakan Indonesia (TIMPINAS) pada rangkaian Dies Natalis ke-43 Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia (ISMAPETI). Kegiatan bergengsi ini digelar di Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang, pada 1–6 November 2026.

Mengusung tema "Memperkuat Regenerasi, Membangun Kolaborasi, Memajukan Peternakan Indonesia yang Berkelanjutan", ajang ini mempertemukan 260 mahasiswa dari 27 kampus di seluruh Indonesia. Di tengah persaingan ketat tingkat nasional, HIMATER Untad membuktikan bahwa gagasan dari Sulawesi Tengah mampu berdiri sejajar dan bersinar.

Delegasi HIMATER Untad tampil di dua kategori lomba, yakni Business Plan dan Poster, dengan dua karya inovatif yang menjawab tantangan peternakan masa depan.

Business Plan: "GRAFANI Smart Chip", Inovasi teknologi ini merupakan pemantauan lokasi, aktivitas, dan suhu ternak.

Dengan sistem ini, peternak dapat mengawasi kondisi ternaknya secara lebih akurat, cepat, dan efisien, sebuah langkah nyata menuju peternakan yang cerdas dan modern.

Sementara Poster: "Smart Farming" merupakan gagasan teknologi untuk memajukan sektor peternakan di Sulawesi Tengah, daerah dengan potensi besar ternak sapi, kambing, dan ayam. Lewat teknologi ini, peternak dapat memantau kondisi kandang, mengatur suhu, hingga memberikan pakan secara otomatis. Harapannya, peternakan Sulawesi Tengah semakin modern, efisien, dan produktif.

Salah satu anggota tim, Siti Nurmila, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum HIMATER Untad, mengungkapkan rasa bangganya.

"Dari 260 mahasiswa dari 27 kampus se-Indonesia, kami bisa pulang membawa Silver Medal dan Juara 2 untuk Sulawesi Tengah. Saya sangat bangga. Ini bukan hanya kemenangan untuk HIMATER dan Untad, tetapi bukti bahwa mahasiswa Jurusan Peternakan dan Sosial Ekonomi Peternakan juga bisa bersaing dan menang di tingkat nasional," ujar Siti Nurmila.

Prestasi ini menjadi bukti bahwa anak-anak muda Sulawesi Tengah mampu melahirkan inovasi yang berdaya saing nasional. Capaian HIMATER Untad ini diharapkan menyalakan semangat seluruh mahasiswa peternakan untuk terus berkarya, berinovasi, dan mengharumkan nama daerah serta bangsa.*ENG

Wali Kota Palu Minta Kerusuhan Tatura-Nunu Diusut Tuntas

SULTENG RAYA-Wali Kota Palu Hadianto Rasyid meminta kepolisian mengusut tuntas kerusuhan antara warga Kelurahan Tatura dan Nunu untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.

"Jangan mau diprovokasi atau diajak berkelahi. Hentikan semuanya," kata Hadianto saat bertemu warga di Kantor Kelurahan Nunu, Sabtu (7/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Hadianto meminta aparat penegak hukum mengidentifikasi pihak yang menjadi dalang dan seluruh pihak yang terlibat dalam kerusuhan. Ia juga meminta proses penanganan perkara segera diselesaikan melalui koordinasi dengan pemerintah setempat.

"Jangan sampai perhatian kita dialihkan oleh hal-hal seperti ini," ujarnya.

Dia meminta masyarakat tidak terpengaruh provokasi atau membiarkan pihak lain memanfaatkan situasi untuk memperkeruh keadaan. Kedua kelompok warga juga diminta tidak berprasangka atau menganggap pihak lain akan melakukan penyerangan.

Hadianto mengatakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) harus segera dipulihkan. Pemerintah daerah bersama kepolisian berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Menurut dia, kerusuhan antara warga Tatura dan Nunu menjadi pelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam menjaga keamanan lingkungan.

Ia meminta ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), serta Satuan Tugas (Satgas) Pancasila yang dibentuk pemerintah meningkatkan komunikasi antarkawasan guna menjaga situasi tetap kondusif.

Hadianto juga mengakui pemerintah daerah memiliki kekurangan dalam mengantisipasi awal terjadinya kerusuhan tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Palu memberikan pendampingan hukum dan pendekatan keadilan restoratif kepada warga yang menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian.

"Saya meminta warga dapat kooperatif menyampaikan informasi. Tidak perlu takut. Pemerintah berkomitmen memberikan pendampingan," katanya.

Sebelumnya, kerusuhan antara warga Kelurahan Tatura dan Nunu terjadi pada Rabu (28/10) dan mengakibatkan korban jiwa.

Hingga kini, kepolisian masih menyiagakan personel untuk menjaga keamanan di kedua wilayah tersebut dengan mendirikan posko pengamanan. ANT



WALIKOTA Palu Hadianto Rasyid (kedua kanan) bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) saat melakukan pertemuan di Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga dan Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan di Kota Palu, Sabtu (7/11/2026). **FOTO: ANT/HO-AFIA.**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU


Dr. Indah Ahdiah, S.Sos., M.Si
Ketua BPH


Prof. Dr. H Rajindra Rum, SE, MM
Rektor


Dr. Sudriman, S.KM M. Kes
Wakil Rektor I


Dr. Burhanuddin SE, M. M
Wakil Rektor II


Dr. Budiman, S.Pd., M.Kes
Warek III


Dr. Moh Yusuf Hasmin, S.H, M.H
Warek IV

Jelang Tanwir Muhammadiyah, Abdul Mu'ti Isi Tabligh Akbar



SULTENG RAYA — -Menyambut gelaran akbar nasional Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah yang dijadwalkan berlangsung pada bulan November tahun 2026 ini. Sebagai rangkaian pembuka, Panitia Penerima Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah mengagendakan Tablig Akbar pada Kamis, 12 November 2026, bertempat di Masjid Baitul Khairaat, Kota Palu.

Kegiatan ini menghadirkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI yang juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed sebagai pembicara utama.

Ketua Panitia Penerima Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM, menyampaikan undangan terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Tengah.

"Tablig Akbar ini terbuka untuk umum sebagai wujud kebersamaan, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah wathaniyah. Melalui momentum ini, kami berharap jalinan silaturahmi antar sesama anak bangsa semakin erat terjalin, merajut kembali kebersamaan di tengah dinamika sosial politik bangsa yang terus berkembang," ujar Prof. Rajindra.

Ajakan tersebut selaras dengan tema besar yang diusung dalam Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah tahun ini, yakni "Bersama Satukan Bangsa". Di tengah tantangan krisis multidimensional dan potensi perpecahan, Muhammadiyah berkomitmen merawat Indonesia, menjaga keutuhan NKRI, serta mengarahkan potensi bangsa menuju kemajuan yang berkeadaban.

Sidang Tanwir sendiri merupakan forum permusyawaratan tertinggi kedua di dalam Persyarikatan Muhammadiyah setelah Muktamar. Forum ini mempertemukan pimpinan Muhammadiyah dari tingkat wilayah hingga pusat untuk merumuskan kebijakan strategis, membahas isu keumatan, mengkaji AD/ART organisasi, serta mempersiapkan keputusan penting menjelang Muktamar berikutnya.

Puncak Sidang Tanwir Muhammadiyah akan dilaksanakan secara resmi pada 13–15 November 2026 yang dipusatkan di kompleks kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu.

Perhelatan ini terasa semakin istimewa karena rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kehadiran Kepala Negara di tengah muktamirin dan warga Muhammadiyah menjadi simbol sinergi kuat antara pemerintah dan elemen masyarakat sipil dalam membangun Indonesia yang maju, adil, makmur, dan bermartabat. ENG